INSANTARA: Jurnal Pengabdian Masyarakat

Vol. 1, No. 2, Desember, 2026

Pendampingan Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja Informal di Desa Bontorannu Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba

Assistance in BPJS Employment Registration for Informal Workers in Bontorannu Village, Kajang District, Bulukumba Regency

Muhammad Alhamdy Arzyl Aswan[1*], Nirmala Sari[2], Putri Aqila Balqis[3], Faizah Tsabitah Aras[4], Fatmawati Juniati Astari Kenang[5], Zaskia Ramadhani[6], Nur Aini Rifdah[7], Sulastrid Putri Amanda[8], Nurul Ain[9], Budiman[10], Muhammad Irwan[11]

[1] Teknik Arsitektur, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
[2] Ilmu Ekonomi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
[3] Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
[4] Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
[5] Hukum Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
[6] Sejarah Peradaban Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
[7] Farmasi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
[8] Manajemen Haji dan Umrah, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
[9] Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
[10] Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
[11] Matematika, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

*Email Korespondensi alhamdyaswan@gmail.com

Abstrak

Pekerja informal seperti petani, pekebun, pedagang, dan pekerja lepas di Desa Bontorannu, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, memiliki risiko dalam menjalankan pekerjaannya, namun belum seluruhnya memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Kondisi tersebut menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pendampingan pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan sebagai upaya membantu masyarakat memperoleh akses terhadap perlindungan bagi pekerja. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan membantu masyarakat dalam proses pendataan serta pendaftaran program BPJS Ketenagakerjaan. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan diskusi bersama perangkat desa untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, kemudian dilanjutkan dengan pendataan calon pendaftar secara door to door selama dua minggu. Hasil pendataan awal memperoleh 45 orang yang berminat untuk mendaftar. Selanjutnya, mahasiswa bekerja sama dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan sosialisasi mengenai program dan manfaat kepesertaan. Setelah sosialisasi, jumlah masyarakat yang berminat mendaftar meningkat

menjadi 62 orang. Data calon pendaftar kemudian dikumpulkan dan disampaikan kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan untuk ditindaklanjuti dalam proses pendaftaran. Kegiatan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi dan akses awal terhadap perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Program akan dilanjutkan oleh pemerintah desa karena masih terdapat masyarakat yang belum mendaftar. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam memperluas akses perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat pekerja informal di Desa Bontorannu.

Kata kunci: BPJS Ketenagakerjaan; pekerja informal; pendampingan; pendaftaran; Desa Bontorannu

Abstract

Informal workers such as farmers, plantation workers, traders, and casual workers in Bontorannu Village, Kajang District, Bulukumba Regency, face various risks in carrying out their occupations, while not all of them have access to employment social protection. This condition became the basis for implementing an assistance program for BPJS Employment registration to help the community gain access to employment protection. This activity aimed to improve community understanding and assist residents in the data collection and registration process for the BPJS Employment program. The activity began with discussions with village officials to identify community needs, followed by door-to-door data collection of prospective registrants for two weeks. The initial data collection identified 45 people who expressed interest in registering. Subsequently, the KKN students collaborated with BPJS Employment to conduct a socialization activity concerning the program and its benefits. Following the socialization, the number of residents interested in registering increased to 62 people. The prospective registrants' data were then collected and submitted to BPJS Employment for further registration procedures. This activity facilitated community access to information and provided initial assistance in obtaining employment social protection. The program will be continued by the village government because some residents have not yet registered. This activity serves as an initial step toward expanding access to employment social protection for informal workers in Bontorannu Village.

Keywords: *BPJS Employment; informal workers; assistance; registration; Bontorannu Village*

PENDAHULUAN

Jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan salah satu bentuk perlindungan bagi pekerja dalam menghadapi risiko yang dapat terjadi selama menjalankan pekerjaan. Perlindungan tersebut penting tidak hanya bagi pekerja formal, tetapi juga bagi pekerja informal yang bekerja secara mandiri dan tidak memiliki hubungan kerja dengan perusahaan. Pekerja informal mencakup berbagai kelompok yang memperoleh penghasilan melalui kegiatan ekonomi secara mandiri, seperti pedagang, petani, pekerja lepas, dan jenis pekerjaan lainnya. Dalam ketentuan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan, pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri termasuk dalam kelompok peserta Bukan Penerima Upah (BPU) (Pemerintah Republik Indonesia, 2015). BPJS Ketenagakerjaan juga menjelaskan bahwa pekerja BPU merupakan orang yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan, sehingga kelompok ini memiliki ruang untuk memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan, 2026).

Keberadaan pekerja informal memiliki posisi penting dalam struktur ketenagakerjaan Indonesia. Data ketenagakerjaan menunjukkan bahwa pekerja dalam kegiatan informal masih mencakup lebih dari separuh penduduk yang bekerja. Pada Agustus 2024, proporsi penduduk yang bekerja dalam kegiatan informal tercatat sebesar 65,04 persen, sedangkan pekerja formal sebesar 34,96 persen (Badan Pusat Statistik, 2025). Besarnya proporsi tersebut menunjukkan bahwa perluasan perlindungan sosial ketenagakerjaan tidak dapat hanya berfokus pada pekerja formal. Pekerja informal juga menghadapi kerentanan berupa pendapatan yang tidak selalu tetap, kondisi kerja yang beragam, serta keterbatasan akses terhadap perlindungan sosial.

Hal ini menunjukkan bahwa pekerja informal di Indonesia menghadapi kerentanan yang berkaitan dengan keterbatasan jaring pengaman dan akses terhadap perlindungan

sosial. Kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya upaya yang dapat mendekatkan informasi dan akses jaminan sosial kepada masyarakat pekerja informal.

Permasalahan akses terhadap jaminan sosial juga berkaitan dengan tingkat pemahaman masyarakat mengenai manfaat dan mekanisme kepesertaan. Rahmawati & Istiqomah (2023) menemukan bahwa jumlah pekerja sektor informal tidak selalu sejalan dengan jumlah pekerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sementara itu, Anwar et al. (2023) menunjukkan bahwa kesadaran pekerja informal mengenai jaminan sosial ketenagakerjaan masih menjadi salah satu persoalan yang perlu diperhatikan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi dan pendampingan dapat menjadi bagian penting dalam memperkenalkan program sekaligus membantu masyarakat memahami proses kepesertaan.

Kondisi tersebut relevan dengan keadaan masyarakat di Desa Bontorannu, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Berdasarkan hasil diskusi awal dengan pemerintah desa dan pengamatan selama kegiatan KKN, terdapat masyarakat yang bekerja sebagai petani, pekerja perkebunan, pedagang, serta pekerja lainnya yang termasuk dalam kelompok pekerja informal. Sebagian masyarakat tersebut belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kondisi ini menjadi dasar dilaksanakannya kegiatan pendampingan pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan dengan sasaran masyarakat pekerja informal di Desa Bontorannu.

Kegiatan pendampingan dilakukan melalui pendekatan langsung kepada masyarakat. Pendekatan tersebut dipilih karena permasalahan yang dihadapi bukan hanya berkaitan dengan ketersediaan program, tetapi juga bagaimana masyarakat memperoleh informasi dan bantuan dalam proses awal kepesertaan. Penelitian Pristanti et al. (2022) mengenai implementasi BPJS Ketenagakerjaan pada pekerja informal di tingkat desa menunjukkan bahwa pelaksanaan program membutuhkan tahapan dan proses yang memungkinkan masyarakat memperoleh informasi serta memahami prosedur kepesertaan. Selain itu, penelitian Sari & Adi (2020) menunjukkan bahwa pemerintah desa dapat berperan dalam membangun kesadaran masyarakat pekerja informal melalui kegiatan sosialisasi dan pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian ini bertujuan membantu masyarakat pekerja informal di Desa Bontorannu dalam memperoleh informasi dan akses awal terhadap pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan. Kegiatan dilakukan melalui pendataan masyarakat secara door to door, pemberian informasi melalui sosialisasi bersama pihak BPJS Ketenagakerjaan, serta pengumpulan dan penyampaian data calon pendaftar kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan. Pendekatan tersebut diharapkan dapat membantu memperluas jangkauan informasi dan mendorong masyarakat untuk mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan. Kebaruan kegiatan ini terletak pada pendampingan secara langsung dari tingkat rumah tangga hingga penyampaian data calon pendaftar kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan, dengan melibatkan pemerintah desa sebagai pihak yang akan melanjutkan program setelah kegiatan KKN berakhir.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Bontorannu, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba dalam rangka pelaksanaan program kerja KKN. Sasaran kegiatan adalah masyarakat Desa Bontorannu yang bekerja secara mandiri atau tidak memiliki hubungan kerja formal, terutama masyarakat yang bekerja sebagai petani, pekebun, pedagang, dan pekerja lepas lainnya. Pemilihan sasaran tersebut didasarkan pada hasil diskusi awal dengan perangkat desa dan kondisi masyarakat yang sebagian besar memiliki karakteristik pekerjaan yang sesuai dengan kategori pekerja Bukan Penerima Upah.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan. Tahap pertama adalah identifikasi kebutuhan dan koordinasi dengan pemerintah desa. Mahasiswa melakukan diskusi dengan perangkat Desa Bontorannu untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi masyarakat serta menentukan program yang dianggap relevan dengan kondisi desa. Dari hasil diskusi tersebut, pendampingan pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan dipilih sebagai salah satu program kerja karena masih terdapat masyarakat yang belum memiliki perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Tahap kedua adalah pendataan calon peserta. Mahasiswa melakukan pendataan secara langsung dengan mengunjungi rumah masyarakat satu per satu. Pendekatan ini

dilakukan selama kurang lebih dua minggu. Pada tahap tersebut, mahasiswa menjelaskan secara singkat tujuan pendataan dan menanyakan kesediaan masyarakat untuk mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan. Masyarakat yang menyatakan berminat kemudian didata sebagai calon peserta.

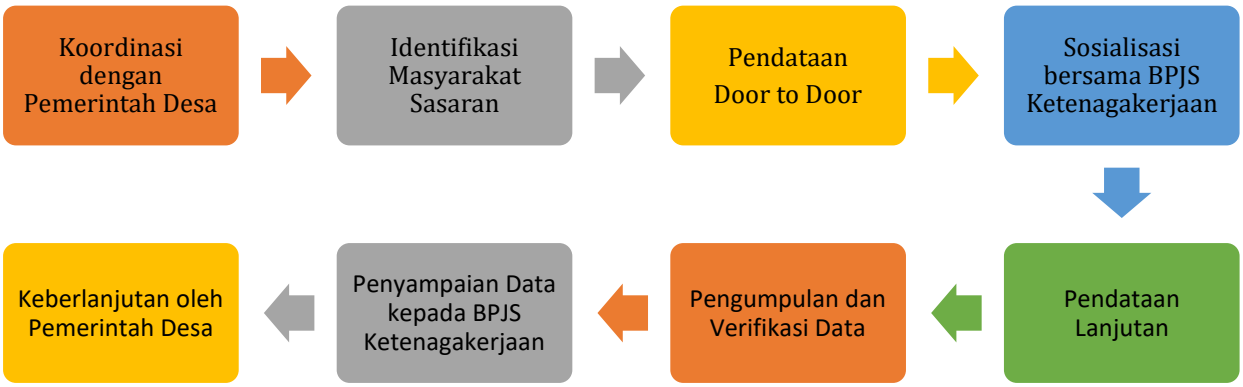
Tahap ketiga adalah sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan. Setelah pendataan awal selesai, mahasiswa bekerja sama dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat Desa Bontorannu. Kegiatan tersebut memberikan penjelasan mengenai BPJS Ketenagakerjaan, kelompok pekerja yang dapat menjadi peserta, manfaat perlindungan, serta proses kepesertaan. Bagi pekerja BPU, program BPJS Ketenagakerjaan menyediakan perlindungan yang antara lain mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Tahap keempat adalah pendataan lanjutan dan pengumpulan data calon peserta. Setelah masyarakat memperoleh penjelasan secara langsung melalui kegiatan sosialisasi, jumlah masyarakat yang berminat mengalami peningkatan. Data calon peserta kemudian dikumpulkan dan diperiksa kembali sebelum disampaikan kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan untuk proses pendaftaran.

Tahap kelima adalah penyerahan data kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan. Data masyarakat yang telah terkumpul disampaikan kepada pihak BPJS sebagai tindak lanjut proses kepesertaan. Keberhasilan kegiatan dievaluasi secara sederhana melalui jumlah masyarakat yang berhasil didata dan menunjukkan minat untuk mengikuti program, serta peningkatan jumlah calon peserta setelah kegiatan sosialisasi.

Berdasarkan tahapan pelaksanaan yang telah diuraikan, kegiatan pendampingan pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan di Desa Bontorannu dilaksanakan melalui proses yang berurutan, mulai dari koordinasi dan identifikasi kebutuhan masyarakat bersama pemerintah desa, pendataan calon peserta secara door to door, sosialisasi bersama pihak BPJS Ketenagakerjaan, hingga pendataan lanjutan, pengumpulan, verifikasi, dan penyampaian data calon peserta kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, keberlanjutan program menjadi bagian dari upaya agar pendataan dan pemberian informasi kepada masyarakat yang belum mengikuti program tetap dapat dilanjutkan oleh pemerintah

desa. Rangkaian tahapan tersebut disusun untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan sekaligus memastikan bahwa proses pendampingan berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sasaran. Secara keseluruhan, alur pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini disajikan pada Bagan 1.



Bagan 1. Bagan Alur Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Awal Masyarakat Sasaran

Kegiatan pendampingan diawali dengan diskusi bersama pemerintah Desa Bontorannu untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan hasil diskusi dan pengamatan lapangan, ditemukan bahwa sebagian masyarakat bekerja pada sektor informal, seperti petani, pekerja perkebunan, pedagang, dan pekerjaan lainnya. Karakteristik tersebut sesuai dengan kelompok Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU), yaitu pekerja yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan (BPJS Ketenagakerjaan, 2026).

Kondisi pekerja informal menjadi perhatian karena kelompok tersebut dapat menghadapi risiko pekerjaan tanpa memperoleh perlindungan sebagaimana pekerja yang berada dalam hubungan kerja formal. Hal ini sejalan dengan Rahmawati & Istiqomah (2023) yang menunjukkan bahwa kepesertaan pekerja sektor informal dalam BPJS Ketenagakerjaan

masih menjadi persoalan. Anwar et al. (2023) juga menemukan bahwa kesadaran pekerja informal mengenai manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan masih perlu ditingkatkan. Dengan demikian, kegiatan pendampingan di Desa Bontorannu diarahkan bukan hanya untuk mengumpulkan data masyarakat, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai pentingnya perlindungan sosial ketenagakerjaan.

2. Pendataan Masyarakat Secara Door to Door

Pendataan dilakukan secara door to door dengan mendatangi masyarakat dari rumah ke rumah selama dua minggu. Pendekatan ini dilakukan untuk memperoleh data calon pendaftar secara langsung sekaligus memberikan penjelasan awal mengenai program BPJS Ketenagakerjaan. Dari pendataan awal tersebut diperoleh sebanyak 45 orang yang menyatakan berminat untuk mengikuti proses pendaftaran.

Pendekatan langsung kepada masyarakat menjadi penting karena akses terhadap informasi merupakan salah satu aspek yang memengaruhi keterlibatan pekerja informal dalam program jaminan sosial. Rendahnya kepesertaan pekerja informal dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan dapat berkaitan dengan keterbatasan sosialisasi, kurangnya pemahaman mengenai prosedur pendaftaran, serta persepsi masyarakat terhadap besarnya iuran. Ardianingsih et al. (2021) menemukan sejumlah kendala tersebut dalam kajian kepesertaan pekerja sektor informal di Kota Pekalongan. Madya (2024) menunjukkan bahwa isu jaminan sosial pekerja informal di Indonesia berkaitan dengan peran pemerintah, perlindungan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, pendampingan di tingkat desa dapat menjadi salah satu bentuk pendekatan untuk mendekatkan informasi program kepada masyarakat.

Pendekatan langsung memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pertanyaan dan memperoleh penjelasan secara lebih sederhana. Selain itu, cara ini membantu mahasiswa menjangkau masyarakat yang mungkin tidak mengikuti kegiatan sosialisasi secara umum atau belum memperoleh informasi mengenai BPJS Ketenagakerjaan.

3. Sosialisasi Bersama BPJS Ketenagakerjaan

Tahap berikutnya dilakukan melalui kerja sama dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan dalam kegiatan sosialisasi. Kegiatan ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh penjelasan yang lebih lengkap mengenai kepesertaan, program perlindungan, serta proses pendaftaran. BPJS Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa pekerja BPU dapat memperoleh perlindungan melalui program seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), serta dapat mengikuti program lainnya sesuai ketentuan kepesertaan (Badan Pusat Statistik, 2025).

Materi yang disampaikan berkaitan dengan pengertian BPJS Ketenagakerjaan, kategori pekerja BPU, manfaat kepesertaan, serta mekanisme pendaftaran. Bagi pekerja BPU, BPJS Ketenagakerjaan menyediakan program yang mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua sesuai dengan kepesertaan yang dipilih.

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan jumlah masyarakat yang berminat untuk mengikuti proses pendaftaran. Sebelum sosialisasi terdapat 45 orang yang telah terdata sebagai calon pendaftar, sedangkan setelah kegiatan sosialisasi jumlahnya meningkat menjadi 62 orang. Perluasan kepesertaan pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) membutuhkan strategi yang memperhatikan karakteristik dan kondisi ekonomi pekerja informal. Siregar (2024) menjelaskan bahwa upaya memperoleh dan mempertahankan kepesertaan BPU menghadapi berbagai tantangan, sehingga strategi perluasan kepesertaan menjadi bagian penting dalam pengembangan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa pemberian informasi secara langsung dapat membantu masyarakat memahami program yang ditawarkan. Temuan ini sejalan dengan Anwar et al. (2023) yang menempatkan kesadaran masyarakat sebagai salah satu aspek penting dalam minat pekerja informal untuk mengikuti jaminan sosial ketenagakerjaan.

Perluasan kepesertaan pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) membutuhkan strategi yang memperhatikan karakteristik dan kondisi ekonomi pekerja informal. Siregar (2024) menjelaskan bahwa upaya memperoleh dan mempertahankan kepesertaan BPU menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, sosialisasi dan pendampingan secara

langsung perlu dilakukan untuk membantu masyarakat memahami manfaat serta proses kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

4. Penyampaian Data Calon Peserta

Setelah proses pendataan dan sosialisasi selesai, data masyarakat yang berminat kemudian dikumpulkan dan disampaikan kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan untuk ditindaklanjuti dalam proses pendaftaran. Pada tahap ini, masyarakat yang telah didata belum seluruhnya dapat disebut sebagai peserta aktif karena proses pendaftaran masih ditindaklanjuti oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, hasil kegiatan pada tahap ini lebih tepat disebut sebagai bertambahnya jumlah calon pendaftar atau masyarakat yang berminat mengikuti program.

Proses tersebut menunjukkan bahwa pendampingan dapat membantu menghubungkan masyarakat dengan lembaga penyelenggara jaminan sosial. Pristanti et al. (2022) menjelaskan bahwa implementasi program BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal membutuhkan proses dan tahapan pelaksanaan yang memungkinkan program dapat diterima oleh kelompok sasaran. Dengan adanya pendataan dan penyampaian data kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan, masyarakat memperoleh akses awal yang lebih terarah terhadap proses kepesertaan.

Pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) memerlukan tahapan yang jelas agar masyarakat dapat memperoleh akses terhadap perlindungan yang tersedia. Simamora et al. (2025) membahas implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi tenaga kerja BPU di Kota Jambi. Kajian tersebut relevan dengan kegiatan pendampingan di Desa Bontorannu karena keduanya membahas pelaksanaan program perlindungan jaminan sosial bagi pekerja di luar hubungan kerja formal.

5. Manfaat dan Dampak Program bagi Masyarakat

Output utama kegiatan adalah terhimpunnya 62 orang masyarakat yang berminat mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan dan data calon peserta yang selanjutnya

disampaikan kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan. Kepesertaan tersebut diharapkan memberikan akses perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat yang selama ini bekerja secara mandiri.

Perlindungan tersebut penting karena pekerja informal tetap menghadapi risiko dalam menjalankan pekerjaannya. Jaminan Kecelakaan Kerja memberikan manfaat berupa pelayanan kesehatan dan/atau santunan ketika peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat lingkungan kerja. Sementara itu, Jaminan Kematian memberikan manfaat kepada ahli waris apabila peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja.

Bagi masyarakat Desa Bontorannu yang bekerja sebagai petani, pekebun, pedagang, dan pekerja lepas, keberadaan perlindungan tersebut dapat menjadi salah satu bentuk pengelolaan risiko dalam aktivitas pekerjaan. Dengan demikian, program KKN ini tidak berhenti pada kegiatan administratif pendaftaran, tetapi diarahkan untuk membantu masyarakat mengenal dan mengakses perlindungan sosial yang sesuai dengan karakteristik pekerjaan mereka.

6. Faktor Pendukung dan Kendala Pelaksanaan

Salah satu faktor pendukung utama kegiatan adalah adanya dukungan dan komunikasi dengan pemerintah Desa Bontorannu sejak tahap awal. Diskusi dengan perangkat desa membantu mahasiswa memahami kondisi masyarakat dan menentukan program yang relevan dengan kebutuhan desa. Kerja sama dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan juga menjadi faktor penting karena masyarakat dapat memperoleh informasi langsung dari pihak yang memahami program dan mekanisme kepesertaan.

Sementara itu, proses pendataan door to door membutuhkan waktu dan tenaga karena mahasiswa harus mengunjungi masyarakat dari rumah ke rumah. Selain itu, tidak semua masyarakat langsung menunjukkan minat untuk mendaftar sehingga diperlukan komunikasi dan penjelasan secara bertahap. Kondisi tersebut membuat proses pendataan membutuhkan waktu sekitar dua minggu.

7. Keberlanjutan Program

Dampak utama kegiatan adalah meningkatnya jumlah masyarakat yang terdata dan berminat mengikuti proses pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan, dari 45 orang menjadi 62 orang. Selain itu, kegiatan memberikan pengalaman kepada masyarakat mengenai proses memperoleh informasi dan mengakses program jaminan sosial ketenagakerjaan secara lebih dekat. Perlindungan bagi pekerja informal menjadi penting karena kelompok tersebut merupakan bagian besar dari struktur ketenagakerjaan Indonesia dan menghadapi risiko sosial-ekonomi yang berbeda dengan pekerja formal (Anandari et al., 2026).

Program ini tidak berhenti pada pelaksanaan KKN. Pemerintah Desa Bontorannu menyatakan akan melanjutkan upaya pendataan dan pendaftaran karena masih terdapat masyarakat yang belum mengikuti BPJS Ketenagakerjaan. Keberlanjutan tersebut penting karena perluasan perlindungan sosial bagi pekerja informal membutuhkan upaya yang dilakukan secara berkelanjutan. Pengalaman di daerah lain juga menunjukkan bahwa keterlibatan pemerintah desa dapat mendukung pembentukan kesadaran dan perluasan akses jaminan sosial bagi pekerja informal (Sari & Adi, 2020).

Keberlanjutan program menjadi penting agar hasil yang telah dicapai selama pelaksanaan KKN dapat dikembangkan lebih lanjut. Pemerintah desa diharapkan dapat melanjutkan pendataan masyarakat yang belum terdaftar, memberikan informasi mengenai kepesertaan, serta melakukan koordinasi dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan apabila diperlukan.

Keberlanjutan program KKN di Desa Bontorannu diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Kegiatan ini tidak hanya menghasilkan 62 calon peserta yang berminat mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, tetapi juga menjadi dasar bagi pemerintah desa untuk melanjutkan pendataan dan mendorong perluasan kepesertaan bagi masyarakat yang belum terdaftar.

Tabel 1. Hasil Pendataan Awal Calon Peserta BPJS Ketenagakerjaan

No.	Tahapan	Hasil
1.	Pendataan Masyarakat secara Door to Door	45 Orang
2.	Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan	Dilaksanakan Bersama Pihak BPJS
3.	Jumlah Calon Peserta setelah selesai Sosialisasi	62 Orang
4.	Tambahan Calon Peserta	17 Orang

(Sumber: Data olahan tim)

Hasil pendataan awal calon peserta BPJS Ketenagakerjaan di Desa Bontorannu menunjukkan adanya peningkatan minat masyarakat setelah dilaksanakan kegiatan sosialisasi. Berdasarkan Tabel 1, pendataan masyarakat secara door to door berhasil mengidentifikasi sebanyak 45 orang yang berminat mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan. Setelah sosialisasi dilaksanakan bersama pihak BPJS Ketenagakerjaan, jumlah calon peserta meningkat menjadi 62 orang. Dengan demikian, terdapat tambahan sebanyak 17 calon peserta dibandingkan dengan hasil pendataan awal. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi dan pendampingan membantu memperluas informasi serta meningkatkan minat masyarakat terhadap program BPJS Ketenagakerjaan. Jumlah tersebut merupakan calon peserta yang berminat, sedangkan proses pendaftaran selanjutnya masih perlu ditindaklanjuti oleh pihak terkait.



(Sumber: Dokumentasi KKN UIN Alauddin Makassar Angkatan 79 Desa Bontorannu Kec. Kajang Kab. Bulukumba)

Gambar 1. Kompilasi kegiatan pengabdian pada desa Bontorannu (dari kiri atas: Pendataan masyarakat, sosialisasi oleh pihak BPJS, dan foto bersama setelah sosialisasi)

Dokumentasi kegiatan pendampingan pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan di Desa Bontorannu ditunjukkan pada Gambar 1. Gambar tersebut memperlihatkan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa KKN bersama masyarakat dan pihak BPJS Ketenagakerjaan. Secara berurutan dari kiri atas searah jarum jam, gambar pertama dan kedua menunjukkan kegiatan pendampingan pendaftaran yang dilakukan oleh mahasiswa KKN kepada masyarakat. Gambar ketiga memperlihatkan kegiatan sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan yang disampaikan oleh pihak BPJS, sedangkan gambar keempat menunjukkan foto bersama setelah kegiatan sosialisasi selesai dilaksanakan. Dokumentasi ini menggambarkan keterlibatan mahasiswa KKN, masyarakat, dan pihak BPJS Ketenagakerjaan dalam mendukung pelaksanaan program pendampingan pendaftaran bagi pekerja informal di Desa Bontorannu.

KESIMPULAN

Kegiatan pendampingan pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan di Desa Bontorannu, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba dilaksanakan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dengan sasaran utama pekerja mandiri dan pekerja informal seperti petani, pekebun, pedagang, dan pekerja lepas lainnya. Program diawali dengan koordinasi bersama perangkat desa, kemudian dilanjutkan dengan pendataan masyarakat secara door to door selama kurang lebih dua minggu. Dari pendataan awal diperoleh 45 orang yang berminat mengikuti program. Setelah dilaksanakan sosialisasi bersama pihak BPJS Ketenagakerjaan, jumlah calon peserta meningkat menjadi 62 orang.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa pendekatan langsung melalui pendataan rumah ke rumah yang dilanjutkan dengan sosialisasi bersama pihak BPJS dapat membantu memperluas jangkauan informasi dan minat masyarakat terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan. Data calon peserta selanjutnya disampaikan kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan untuk ditindaklanjuti dalam proses pendaftaran. Program ini juga memiliki keberlanjutan karena pemerintah Desa Bontorannu menyatakan akan melanjutkan pendataan dan pendaftaran bagi masyarakat yang belum mengikuti program. Dengan demikian, kegiatan KKN ini menjadi langkah awal dalam membantu memperluas akses masyarakat Desa Bontorannu terhadap perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Desa Bontorannu, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba yang telah memberikan dukungan dan membantu proses pelaksanaan program. Apresiasi juga disampaikan kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan yang telah bekerja sama dalam pelaksanaan sosialisasi dan proses tindak lanjut pendaftaran masyarakat. Terima kasih juga disampaikan kepada seluruh masyarakat Desa Bontorannu yang telah berpartisipasi dalam kegiatan pendataan dan sosialisasi.

Konflik Kepentingan

Seluruh penulis menyatakan tidak memiliki konflik kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan maupun penyusunan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Anandari, I. G. A. A. A., Budiningsih, N. K., Yudistira, D. B. P. D. A., & Putri, K. S. M. Y. (2026). Left behind in the bounce-back? Informal sector vulnerability in Indonesia's post-pandemic rebound. *Jurnal Ekonomi \& Studi Pembangunan*, *27*(1). https://doi.org/10.18196/jesp.v27i1.26924

Anwar, R. F., Mulyati, H., & Rahmawati, W. J. (2023). Kesadaran konsumen dan niat membeli jaminan sosial ketenagakerjaan pada pekerja sektor informal. *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen*, *9*(2), 604. https://doi.org/10.17358/jabm.9.2.604

Ardianingsih, A., Langelo, J. S., & Wicaksono, P. (2021). Analisis Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Pekerja Sektor Informal di Kota Pekalongan. *Jurnal Litbang Kota Pekalongan*, *19*(2). https://doi.org/10.54911/litbang.v21i1.158

Badan Pusat Statistik. (2025). *Indikator Ketenagakerjaan*. Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2025). *Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2024*. Badan Pusat Statistik. https://www.bps.go.id/

BPJS Ketenagakerjaan. (2026). *Bukan Penerima Upah (BPU)*. BPJS Ketenagakerjaan. https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/

BPJS Ketenagakerjaan. (2026). *Peserta Bukan Penerima Upah (BPU)*. BPJS Ketenagakerjaan. https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/

Madya, S. H. (2024). Jaminan sosial pekerja informal: Studi webnografi. *Jurnal Jamsostek*, *2*(2). https://doi.org/10.61626/jamsostek.v2i2.27

Pemerintah Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian*. Pemerintah Republik Indonesia. https://jdih.kemnaker.go.id/peraturan/detail/1200/peraturan-pemerintah-nomor-44-tahun-2015

Pristanti, S. N., Sukidin, & Hartanto, W. (2022). Implementasi program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan pada pekerja informal (studi kasus di Desa Dukuhdempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember). *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, *16*(2). https://doi.org/10.19184/jpe.v16i2.25240

Rahmawati, D. A., & Istiqomah, N. (2023). Determinan keikutsertaan pekerja sektor informal pada {BPJS} Ketenagakerjaan di Surakarta tahun 2023. *Journal of Policy*, *14*(1), 55–64. https://doi.org/10.20961/policy.v14i1.1266

Sari, M., & Adi, A. S. (2020). Peran pemerintah desa dalam membentuk kesadaran jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsostek) bagi masyarakat pekerja sektor informal di Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, *8*(2), 121–137. https://doi.org/10.26740/kmkn.v8n2.p121-137

Simamora, M. W., Noerjoedianto, D., Hubaybah, Amir, A., & Solida, A. (2025). Implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah di BPJS Ketenagakerjaan Kota Jambi 2024. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, *6*(2), 5565–5574. https://doi.org/10.31004/jkt.v6i2.43907

Siregar, D. J. (2024). Akuisisi dan Retensi Kepesertaan BPU: Mempertahankan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. *Jurnal Jamsostek*, *2*(2), 163–184. https://doi.org/10.61626/jamsostek.v2i2.20